

Jurnal

ISSN 3025-5759

# IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

***Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia***

Alamsyah M Djafar

**Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok (*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia**

Paulus Rudolf Yuniarto

***From Conflictual to Peaceful Coexistence? Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West***

Muhammad Khoirul Muqtafa

**Agama dan Kewarganegaraan: Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali**

Eddy Setiawan

**Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN: Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?**

Husnul Atiyah

**Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia**

Sukman

# Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi  
Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

## **Tim Penyunting:**

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.  
Saifullah Ma'shum, M.Si.  
Sukman, SH., MH.  
Eddy Setiawan, M.Si.  
Adi Kurniawan, M.Si.

## **Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH  
*Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D  
*Universitas Hasanuddin, Makassar*

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D  
*Badan Riset dan Inovasi Nasional*

Rikard Bagun, Ph.D  
*Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH  
*Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta*

## **Pemimpin Redaksi**

Eddy Setiawan

## **Desain dan Tata Letak**

Riska El Haris

## **Distribusi & Tata Usaha**

Waji Haris Setiawan

## **Penerbit**

Institut Kewarganegaraan Indonesia  
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,  
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia  
Telp. 021-2510670,  
Fax. 021-5702755  
[www.yayasan-iki.or.id](http://www.yayasan-iki.or.id)

## **Jurnal IDENTITAS**

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

## **Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)**

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

# Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi  
Volume 04 Nomor 01, Maret 2024

## Daftar Isi

- Pengantar Redaksi ..... i
- *Managing Ambiguity: Religious Intolerance and Policy in Indonesia*  
*Alamsyah M Djafar* ..... 1
- Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok  
(*Xinyimin*) dengan Masyarakat di Indonesia  
*Paulus Rudolf Yuniarto* ..... 34
- *From Conflictual to Peaceful Coexistence?*  
*Reconceptualizing The Relationship between Islam and The West*  
*Muhammad Khoirul Muqtafa* ..... 60
- Agama dan Kewarganegaraan:  
Minoritas Muslim dalam Masyarakat Hindu Bali  
*Eddy Setiawan* ..... 80
- Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN:  
Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?  
*Husnul Atiyah* ..... 106
- Resensi Buku: Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Indonesia  
*Sukman* ..... 127
- Panduan Penulisan Naskah ..... 132
- Tentang Penulis ..... 135

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,  
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan  
etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM



# Menggugat Prinsip *Non-Interference* ASEAN: Dari Idealisme ke Pragmatisme Politik?

**Husnul Atiyah**

Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Paramadina  
Email: husnul2007@gmail.com; husnul.atiyah@students.paramadina.ac.id

## ABSTRACT

Several acts of violence that occurred at the national and international levels received attention from various groups. The conflict between Russia and Ukraine and the Myanmar issue involving the military junta regime have become prominent in recent years. The conflict between Russia and Ukraine, even though it occurred in Eastern Europe, has the potential to have an impact on global security, and is even said to trigger a world war. The violence case in Myanmar, while it occurs on a national (domestic) level, the impacts, especially the violence and abuses of human rights, are extraordinary and are of serious international concern. Both cases sparked criticism from various groups, including the United Nations (UN) at the international level and ASEAN at the regional level. This article discusses ASEAN members' stance on the two violent incidents that occurred by linking it to the principle of non-interference, one of the principles that are very "ASEAN". Through literature study, this paper finds that ASEAN's attitude towards the two cases above is not singular. Each member's attitude of this Southeast Asian regional organization is different, especially in the case of the Russia and Ukraine conflict. In the case of Myanmar, the attitude shown is also not firm. The description of this attitude is closely related to how they interpret the principle of non-interference, which tends to be political and pragmatic in practice, depending on the interests of their respective countries.

*Key words: Myanmar, Russia, Ukraine, ASEAN, non-interference*

## ABSTRAK

*Berbagai tindak kekerasan yang terjadi pada level nasional maupun internasional mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Konflik antara Rusia dan Ukraina dan persoalan Myanmar yang melibatkan rezim junta militer adalah tamsil yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina, meski terjadi*

*di kawasan Eropa timur, namun akibat yang ditimbulkan potensial berdampak pada keamanan global, bahkan disebut bisa memicu perang dunia. Kekerasan di Myanmar, meskipun terjadi dalam skala domestik nasional, namun dampak yang dirasakan, terutama kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat luar biasa dan menjadi perhatian internasional yang serius. Hal ini memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di level internasional dan ASEAN di level regional. Tulisan ini mendiskusikan sikap ASEAN atas dua peristiwa kekerasan yang terjadi dengan mengaitkannya pada prinsip non-interference, salah satu prinsip yang sangat lekat dengan ASEAN. Melalui studi pustaka, tulisan ini menemukan bahwa sikap ASEAN terhadap dua kasus diatas tidaklah tunggal. Masing-masing anggota dari organisasi regional Asia Tenggara ini berbeda-beda, terutama dalam kasus konflik Rusia dan Ukraina. Dalam hal Myanmar, sikap yang ditunjukkan juga tidak tegas. Gambaran sikap ini sangat terkait dengan cara mereka menafsirkan prinsip non-interference yang cenderung politis dan pragmatis, sesuai kepentingan negara masing-masing.*

Kata kunci: Myanmar, Rusia, Ukraina, ASEAN, non-interference

## **Pengantar**

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia yang menyita perhatian global. Bisa disebut, salah satu yang paling mencolok adalah invasi Rusia atas Ukraina yang mulai berlangsung sejak 2022 sampai sekarang. Invasi ini menyita banyak perhatian, tidak hanya di negara-negara belahan Barat dan sekutunya, tapi juga negara-negara di belahan dunia lain. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai harus membuat resolusi untuk menyikapi hal ini, termasuk menanggukhan keanggotaan Rusia dari Dewan Keamanan PBB. Namun, konflik terus berlanjut dan nampaknya akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Ini karena beragam kepentingan yang dipertaruhkan dalam

konflik ini, mulai dari isu wilayah, ekonomi sampai keamanan regional dan global.

Kejadian lain yang juga menarik perhatian adalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara Myanmar atau Burma. Hal ini menuai banyak kecaman serta kutukan dari berbagai negara di dunia termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah menyerukan agar pelanggaran HAM di Myanmar harus segera dihentikan. Alih-alih berangsur membaik, pemerintah Myanmar masih terus melakukan kekerasan dan pelanggaran sehingga desakan untuk memberikan tindakan tegas kepada Myanmar perlu segera dilakukan, khususnya kepada ASEAN (*Association of Southeast Asian*

*Nation*) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.

Tulisan ini bermaksud membahas sikap ASEAN terhadap dua kasus di atas dan dikaitkan dengan prinsip *non-interference* yang menjadi ciri khas organisasi ini. Melihat fenomena ASEAN ini menarik karena ASEAN sendiri dianggap sebagai salah satu organisasi regional di Asia Tenggara yang cukup penting, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan peran aktif dalam konteks regional dan internasional, meskipun di saat yang sama juga tak jarang dipertanyakan sejauh mana kekuatan politik organisasi ini di mata dunia.

Ini karena meskipun sebagai satu organisasi besar, 11 negara ASEAN tidak selalu memiliki satu suara dalam kasus tertentu. Melalui studi pustaka, tulisan ini bermaksud mendiskusikan lebih jauh persoalan di atas. Bagian pertama tulisan ini akan mengantarkan kepada persoalan utama yang dibahas dan dilanjutkan dengan pembahasan dan konteks prinsip *non-interference* ASEAN. Bagian ketiga dan keempat akan mendiskusikan soal sikap ASEAN terhadap kasus Rusia-Ukraina dan kekerasan di Myanmar. Bagian kelima berisi diskusi dan penutup.

### **ASEAN dan Prinsip *Non-Interference***

ASEAN dikenal sebagai salah satu organisasi regional dimana prinsip

*non-interference* menjadi ciri khasnya. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok, prinsip *non-interference* ini menyebutkan bahwa untuk menjaga stabilitas domestik dan kawasan, upaya intervensi dari pihak luar perlu dicegah (Stubbs 2008). Prinsip ini diperkuat dalam berbagai kesepakatan besar asosiasi ini, termasuk *Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration* tahun 1971 dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) (Bellamy & Drummond 2011) yang dirumuskan pada tahun 1976 dimana dalam traktat ini, prinsip *non-interference* bukan hanya menjadi ciri khas tapi juga prinsip dasar dari organisasi regional ini (Stubbs 2008).

Prinsip *non-interference* ini sesungguhnya bukan hanya khas ASEAN (Katsumata 2003). Prinsip ini juga berlaku misalnya di *Conference/Organization for Security and Co-operation in Europe* (CSCE/OSCE). Namun demikian, prinsip *non-interference* menurut ASEAN ini berbeda dalam makna dan praktiknya dibanding organisasi lain. Ini karena, dalam prakteknya, prinsip ini juga beriringan dengan prinsip lain yaitu diplomasi senyap (*quiet diplomacy*) yang kerap dipakai untuk mengatasi ketegangan bilateral. Dalam prinsip ini, para anggota ASEAN menahan diri untuk mengkritik kebijakan yang diambil oleh negara anggota di ruang publik.

Di samping itu, ASEAN sendiri tidak memaknai dengan jelas apa yang dimaksud dengan “*interference*” ini. Namun, kalau melihat sejarah, terutama sebelum dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, dukungan atas prinsip ini bisa dipahami mengingat saat itu kondisi sosial politik di kawasan ini diwarnai dengan instabilitas. Prinsip *non-interference* ini memungkinkan negara anggota untuk melakukan konsolidasi internal dan membatasi resiko intervensi dari pihak eksternal maupun terlibat dalam konflik internasional (Katsumata 2003: 243). Di kawasan Asia Tenggara sendiri, pada tahun 1960-an sampai 1970-an banyak diwarnai berbagai peristiwa yang bisa mengancam kestabilan wilayah (wilayah) ini seperti zaman Konfrontasi, invasi Vietnam atas Kamboja, perang dingin dan isu komunisme yang memecah kawasan ini.

Akan tetapi, praktik politik pada tahun 1990-an oleh negara anggota menunjukkan bahwa “*interference*” ini dipakai sebagai sebuah kontinum yang mewadahi segala bentuk intervensi mulai dari komentar politik sampai intervensi militer (Bellamy & Drummond 2011). Karena itu, para pemimpin negara ASEAN cenderung menahan diri untuk memberikan komentar atas peristiwa yang terjadi di wilayah *domestic* (domestik) negara anggota, terutama yang berkaitan dengan isu HAM. Ini karena ketika hal ini diperbolehkan,

dikhawatirkan akan melemahkan persatuan dan stabilitas organisasi ini. Tafsir yang luas memungkinkan prinsip *non-interference* ala ASEAN ini tidak hanya berfungsi sebagai norma ideal bersama, tapi tidak jarang menjadi “alat politik” bagi negara anggotanya (Nesadurai 2009).

Dalam sejarahnya, beberapa analisis meragukan bahwa ASEAN memegang teguh prinsip ini. Misalnya, di era Perang Dingin dimana ASEAN terlibat aktif membendung persebaran komunisme di wilayah ini (Jones 2010: 484). Hal lain ditunjukkan dengan sikap tegas ASEAN menolak intervensi Vietnam atas Kamboja pada tahun 1970-an untuk membendung kelompok Khmer Merah (Bellamy & Drummond 2011). Contoh paling mutakhir adalah sikap para pemimpin ASEAN yang memilih tidak mengundang pemerintah Myanmar dalam pertemuan ASEAN (ASEAN Summit) yang dilakukan tahun 2021 lalu. Para pemimpin ASEAN meminta pemerintah Myanmar untuk mengirimkan perwakilan non-politik yang kemudian ditolak oleh pemerintah junta militer karena bagi mereka, tindakan ini tidak menempatkan Myanmar sejajar dengan negara lain dan karena itu bisa dianggap tidak menghormati kedaulatan Myanmar (Lim & Yang 2021).

“Inkonsistensi” antara prinsip *non-interference* dan praktek di lapangan ini menjadi pertanyaan besar tentang

seberapa jauh prinsip ini akan tetap menjadi basis relasi bagi negara-negara anggota ASEAN. Dalam tubuh ASEAN sendiri, upaya untuk membongkar kekakuan prinsip ini telah beberapa kali dilakukan. Misalnya, Malaysia pernah mengusulkan gagasan “intervensi konstruktif” (*constructive intervention*) untuk mendorong kemajuan masyarakat sipil, pembangunan manusia, pendidikan dan ekonomi nasional. Namun gagasan ini ditolak. Upaya lain pernah diajukan oleh Thailand dengan tawaran “keterlibatan yang fleksibel” (*flexible engagement*) dimana negara-negara anggota bisa secara terbuka membicarakan masalah domestik yang punya dampak pada perbatasan. Namun, sebagaimana usulan pertama, gagasan inipun ditolak (Alichsan 2019: 28).

Upaya untuk mencari penjelasan yang memadai terkait tidak mudahnya membongkar prinsip *non-interference* dalam sebuah organisasi regional ini coba ditawarkan oleh beberapa pandangan. Satu pandangan menyebutkan bahwa gagasan *non-interference* tidak berlaku dan upaya campur tangan (*intrusive*) bisa dilakukan sesuai dengan kepentingan kekuatan hegemon dalam organisasi regional itu. Dalam konteks ASEAN, hal ini tidak berlaku karena tidak ada satu kekuatan hegemon di kawasan ini. Indonesia sendiri, sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar di ASEAN mengalami beberapa kali

penolakan dalam mendorong ASEAN lebih terbuka dalam menangani isu hak asasi manusia, manajemen bencana dan isu-isu transnasional (Suzuki 2019: 160-161).

Perspektif lain menyebutkan bahwa dampak yang merebak ke wilayah lain dari konflik domestik memungkinkan upaya campur tangan dilakukan. Dalam konteks ASEAN, hal ini juga tidak menemukan pembenarannya. Berbagai konflik domestik yang terjadi di negara anggota ASEAN seperti konflik di wilayah Pattani, Filipina Selatan dan kasus Rohingya di Myanmar berdampak pada negara tetangga, namun upaya campur tangan juga tidak dilakukan (Suzuki 2019: 161). Kasus Myanmar terakhir yang tidak diundang dalam ASEAN Summit pun dikarenakan Myanmar tidak memenuhi 5 poin kesepakatan, bukan karena dampak yang menyebar ke wilayah lain.

Sementara itu, pandangan lain menyebutkan bahwa gagasan *non-interference* maupun campur tangan (*intrusive*) bisa dilakukan sesuai dengan kondisi sebuah negara. Ketika sebuah negara dianggap lemah, apalagi gagal, maka upaya intervensi bisa dilakukan. Dalam konteks ASEAN, kekuatan/kelemahan sebuah negara tidak langsung berhubungan dengan gagasan *non-interference*. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, negara-negara anggota ASEAN cenderung lemah dan rentan ancaman

baik dari internal maupun eksternal. Dalam kondisi ini, prinsip *non-interference* justru membantu negara-negara tersebut mengkonsolidasi kekuatan dan pada gilirannya tumbuh menjadi negara kuat (Suzuki 2019: 161).

Kerumitan untuk memahami gagasan *non-interference* di ASEAN ini karena dalam prakteknya tidak ada satu konsistensi. Tafsir atas *non-interference* yang sangat terbuka memungkinkan beragam pemaknaan muncul dan karena itu perlu dilakukan analisis sesuai dengan konteksnya. Barangkali, tidak salah ketika mantan sekretaris jenderal ASEAN, Rodolfo Severino (dikutip oleh Jones), mengatakan bahwa penerapan prinsip *non-interference* oleh ASEAN dilandasi oleh pertimbangan pragmatis (*pragmatic considerations*) dan karena itu statusnya tidak absolut (Jones 2010). Pernyataan ini makin menegaskan betapa praktik *non-interference* ini tidak selalu menjadi landasan normatif ideal bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak, bahkan tidak jarang ia menjadi justifikasi tindakan politis pragmatis anggotanya.

### **Konflik Rusia-Ukraina dan Sikap ASEAN**

Konflik kekerasan yang melibatkan Rusia dan Ukraina tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan kedua negara tersebut dan persoalan geo politik dan keamanan di negara-negara

bekas Uni Soviet. Ukraina sendiri, dulu, adalah bagian dari Uni Soviet. Namun, semenjak Soviet runtuh, Ukraina menjadi negara merdeka sendiri setelah melalui referendum pada tahun 1991. Kemerdekaan Ukraina ini disetujui oleh Presiden Rusia saat itu, Boris Yeltsin, dan bersama dengan Rusia dan Belarusia, Ukraina mendatangi *Commonwealth of Independent States* (CIS). Dalam perjalanannya, CIS ini pecah karena Ukraina menganggap bahwa CIS adalah bagian dari Rusia untuk mengendalikan negara-negara yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet (Oktarianisa 2022).

Meski demikian, hubungan keduanya masih terus terbangun dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan di antara keduanya. Ini ditunjukkan misalnya dengan penyewaan pelabuhan Sevastopol karena Rusia memiliki mayoritas kapal di armada laut hitam yang berbasis di Krimea Utara. Namun, hubungan keduanya memanas sejak 2014 ketika revolusi menentang supremasi Rusia muncul (Oktarianisa 2022). Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich, sosok yang pro-Rusia berhasil dilengserkan dan sempat memicu kerusuhan sebelum berhasil didamaikan pada tahun 2015. Akan tetapi, gelombang revolusi ternyata tidak berhenti disana. Setelah lama berada dalam bayang-bayang Rusia, Ukraina berkeinginan untuk bergabung

dengan Uni Eropa dan NATO (*the North Atlantic Treaty Organization*), keinginan yang memicu kemarahan Rusia.

Sepeninggal Yanukovych, Rusia menguasai Krimea pada tahun 2014, termasuk mendukung kelompok separatis di Donetsk dan Luhansk untuk memisahkan diri dari Rusia. Pada perkembangan selanjutnya, Rusia mengakui “kemerdekaan” wilayah tersebut, bahkan menempatkan tentara mereka di sana untuk menjaga perdamaian. Pada 2019, Volodymyr Zelenskyy, mantan komedian, memenangkan pemilihan presiden Ukraina dan partai penguasanya memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Zelenskyy harus mengurus persoalan yang dihadapi Ukraina, mulai dari krisis ekonomi sampai perang melawan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia dan memberangus korupsi dalam pemerintahan Ukraina (Walker 2019).

Perihal bergabung dengan NATO, Ukraina sendiri masuk dalam rencana para pemimpin NATO sejak tahun 2008, meskipun saat itu masih jauh dari kenyataan (Nagourney, Bilefsky & Perez-Pena 2023). Semenjak Soviet runtuh, NATO sudah melebarkan sayapnya ke wilayah Eropa Timur. Beberapa negara di kawasan ini yang sudah bergabung misalnya Lithuania, Estonia, Polandia dan Rumania. Ini menjadikan kekuatan dan pengaruh NATO semakin mendekati Moskow. Putin, Presiden Rusia, meli-

hat ekspansi NATO sebagai persoalan serius dan bergabungnya Ukraina akan menjadi ancaman yang besar. Putin berkali-kali menegaskan bahwa, pada dasarnya dilihat dari sejarah dan kebudayaan, Ukraina adalah bagian dari Rusia, meskipun klaim ini berbeda dengan pandangan sebagian besar masyarakat Ukraina.

Perseteraan antara Rusia di bawah Putin dan Ukraina dibawah Zelensky terus berlanjut. Pada tahun 2021, puluhan ribu tentara Rusia dikerahkan di perbatasan Ukraina. Rusia mengeluarkan sederet permintaan kepada NATO dan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan di sana, namun hal ini sulit untuk dipenuhi (Nagourney, Bilefsky & Perez-Pena 2023). Diantara hal yang diminta oleh Rusia termasuk agar Ukraina tidak diterima atau tidak akan bergabung dengan NATO dan agar organisasi tersebut menarik kekuatan mereka dari negara-negara di wilayah Eropa Timur yang sudah bergabung, permintaan yang kemudian ditolak oleh Pemerintahan Biden.

Konflik terus berlanjut dan segera berujung pada “invasi militer” Rusia atas Ukraina. Amerika Serikat menyebut bahwa mereka tidak akan mengirimkan tentara atau pesawat untuk ikut berperang karena Ukraina sendiri belum bergabung dengan NATO (Nagourney, Bilefsky & Perez-Pena 2023). Artinya, mereka tidak mempunyai kewajiban

secara kolektif untuk membantu Ukraina. Namun demikian, Amerika Serikat dan sekutu Ukraina di Eropa mengirimkan ragam persenjataan ke Ukraina, termasuk anti-tank dan system anti-aircraft. Invasi akhirnya terjadi dan terus berlangsung sampai sekarang. Hal ini menuai reaksi beragam dari berbagai negara di belahan dunia.

Sebagian besar negara mengutuk keras tindakan Rusia, sejumlah negara mendukung, baik dengan ungkapan tegas maupun menggunakan bahasa simbolik dan sebagian lainnya memutuskan untuk tidak berkomentar. Pihak yang paling keras bereaksi dalam kelompok pertama diwakili Amerika Serikat dan sekutunya, terutama, di Eropa yang sedikit banyak merasakan dampak dari invasi ini. Kelompok ini sangat vokal bersuara dan mengancam memberikan sanksi sejak invasi dimulai. Negara-negara yang menjadi mitra strategis Rusia seperti Korea Utara cenderung berada di belakang Rusia sementara beberapa negara seperti India memilih tidak berkomentar terkait hal ini.

Tidak hanya dalam konteks global, reaksi yang beragam juga muncul dalam konteks organisasi kawasan semisal ASEAN. Ada yang menarik dari sikap negara anggota ASEAN dalam menanggapi atau memandang konflik Rusia-Ukraina ini, karena meskipun negara ASEAN ini tinggal dalam satu kawasan dan memegang prinsip bersama

tapi punya sikap dan keputusan yang berbeda. Ini terlihat jelas ketika Majelis Umum PBB mengadakan voting terkait konflik Rusia-Ukraina ini. Ada dua voting yang diselenggarakan oleh PBB dalam menyikapi hal ini. Voting pertama dilakukan pada hari Rabu, 2 Maret 2022 untuk resolusi mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Dalam voting tersebut, sebanyak 141 negara mendukung, sementara 5 negara menolak dan 35 negara menyatakan abstain. Dari 10 negara anggota ASEAN, 8 negara mendukung resolusi tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja serta Filipina. Hanya ada dua negara yang memilih abstain yakni Vietnam dan Laos (Tiezzi 2022).

Voting kedua dilakukan pada hari Kamis, 7 April 2022 untuk resolusi penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB (*United Nations Human Rights Council*, UNHCR). Resolusi ini diajukan oleh Ukraina setelah dokumentasi tindakan kejam tentara Rusia kepada warga Ukraina beredar, terutama di kota Bucha. Resolusi ini akhirnya lolos yang berarti keanggotaan Rusia dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) ditangguhkan. Hasil voting sendiri menunjukkan grafik yang menarik dimana sebanyak 93 negara menyatakan setuju, 24 negara memilih menolak dan 58 negara memutuskan abstain. Ada penurunan tajam dari

negara yang memilih menyetujui pada voting pertama, sebanyak 141, menjadi 93 negara. Sementara itu, negara yang menolak dan abstain mengalami kenaikan pada voting kedua ini, dari 5 ke 24 untuk yang menolak dan 35 ke 58 bagi yang abstain (Tiezzi 2022).

Yang menarik dari voting tersebut adalah perubahan sikap dari negara-negara anggota ASEAN. Pada voting pertama, 8 dari 10 negara anggota ASEAN menyetujui resolusi sementara hanya 2 yang menolak. Pada voting kedua, terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana 6 dari 8 negara yang menyetujui pada voting pertama memutuskan abstain pada voting kedua yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Singapura. Dua negara yang awalnya abstain tapi memutuskan menolak pada voting kedua adalah Laos dan Vietnam. Sementara itu, hanya 2 negara yang memilih mendukung yakni Filipina dan Myanmar (Tiezzi 2022).

Sebagai catatan, keputusan Myanmar untuk mendukung voting 7 April adalah karena perwakilan Myanmar di PBB bukanlah mewakili pemerintah Myanmar sekarang. Sementara pemerintah Myanmar sekarang justru memberikan sinyal positif atas tindakan operasi militer khusus Rusia atas Ukraina (Tiezzi 2022). Sedangkan Filipina konsisten dengan pilihannya pada voting 2 Maret. Lebih dari itu, pemerintah Fili-

pina mengatakan bahwa mereka siap membuka pangkalan militer di Teluk Subic untuk Amerika seandainya konflik Rusia dan Ukraina ini menyebar sampai Asia (Strangio 2022).

Sementara Indonesia, sebagai salah satu negara yang memilih abstain, melalui perwakilan tetapnya di PBB, menyebutkan perlunya kehati-hatian dalam menyikapi masalah ini. Untuk itu, Indonesia mendorong agar Komisi Penyelidikan Independen yang dibentuk PBB diberi kesempatan untuk bekerja melakukan penyelidikan lebih dahulu sebelum mengambil sikap. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menggarisbawahi agar tidak terjadi penghakiman sebelum investigasi dilakukan karena itu hanya akan menjadi preseden buruk dalam hubungan internasional (Wardah 2022).

Malaysia dan Vietnam, meski berbeda sikap, memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia (The Star 2022b). Sedangkan Kamboja, melalui Duta Besar nya di PBB, menyebut kemungkinan eskalasi konflik dengan penangguhan Rusia dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB kini. Alih-alih penangguhan, Kamboja menggarisbawahi perlunya kerja sama dari seluruh anggota PBB dalam menghadapi situasi keamanan, stabilitas dan perdamaian yang rentan ini (The Star 2022a).

Yang mengejutkan adalah sikap Singapura setelah sebelumnya mereka

menyetujui pada voting 2 Maret dan bahkan turut memberikan sanksi pada Rusia. Sebelum voting dilakukan, wakil Singapura sempat mengecam keras tindakan penyerangan terus-menerus yang dilakukan oleh Rusia atas Ukraina. Tindakan memilih abstain ini menimbulkan tanda tanya sampai akhirnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura memberikan penjelasan tentang perlunya penyelesaian dilakukan terlebih dahulu untuk membuktikan pelanggaran (Zhang 2022).

### **Kasus Myanmar dan Sikap ASEAN**

Tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menyita perhatian global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyerukan agar pelanggaran HAM di Myanmar harus segera dihentikan. Alih-alih berangsur membaik, pemerintah Myanmar masih terus melakukan kekerasan dan pelanggaran sehingga desakan untuk memberikan tindakan tegas kepada Myanmar perlu segera dilakukan. Pada tahun 2018, Amnesty Internasional mencatat adanya upaya genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine. Sebagai dampaknya, banyak warga Rohingya yang mengungsi, tercatat sekitar 740 ribu warga Rohingya pergi ke Bangladesh. Sampai saat ini, komunitas etnis Rohingya di Myanmar masih banyak mengalami

diskriminasi dimana hak-hak mereka sebagai warga negara seperti akses pendidikan dan kesehatan banyak dilanggar (Amnesty Internasional 2022).

Pada Februari tahun 2021, pemerintahan yang sah di negara ini dikudeta oleh kelompok militer yang sekarang dikenal dengan sebutan pemerintahan junta militer. Bagi drama kekejaman yang seakan tidak berakhir, babak kudeta ini diiringi dengan rentetan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Pemerintahan junta militer ini pun disinyalir semakin gencar melakukan kekerasan termasuk penggunaan senjata berbahaya pada masyarakat sipil terutama kepada para demonstran yang akhirnya semakin banyak memakan korban (Amnesty Internasional 2022). Belum lagi penangkapan ilegal yang diduga masih terus dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap kritis serta membahayakan pemerintahan junta militer tersebut. Human Rights Watch mencatat penangkapan sepihak ini mencapai lebih dari 13.000 orang (Human Rights Watch 2022).

Peristiwa dan konflik kekerasan yang melibatkan junta militer di Myanmar bukanlah barang baru. Semenjak merdeka dari jajahan Inggris pada tahun 1948, Burma (nama Myanmar dulu) sempat melakukan eksperimen-tasi demokrasi, namun 14 tahun kemudian upaya ini berhenti setelah militer dibawah pimpinan Jenderal Ne Win

melakukan kudeta pada tahun 1962. Kekuasaan ini bertahan sampai tahun 1988. Di bawah rezim militer ini, berbagai kebijakan diambil, termasuk pemberlakuan kebijakan luar negeri yang isolasionis dan program ekonomi sosialis. Sampai pada tahun 1988, kondisi ekonomi Burma kian memburuk dan praktek ekonomi banyak dikuasai oleh pasar gelap (*black-market economy*) (Maizland 2022).

Seiring dengan menyebarnya praktek korupsi dan kelangkaan bahan makanan, protes besar dilakukan, namun rezim militer ini menghajar para pendemo dengan perkiraan, paling sedikit, 3000-an meninggal (Maizland 2022). Setelah peristiwa di atas, Jenderal Ne win digantikan oleh junta militer yang lain, meskipun Ne Win tetap berkuasa di balik layar. Pada tahun 1989, nama Burma diganti dengan Myanmar oleh rezim militer yang baru karena nama tersebut dianggap sebagai sisa kolonial yang cenderung bias dan menempatkan mayoritas etnik Burma sebagai mayoritas. Nama Myanmar sendiri diklaim lebih inklusif.

Periode selanjutnya, meski junta militer sedikit mengendurkan kekuasaannya karena soal ekonomi dan munculnya revolusi Saffron pada tahun 2007, rezim junta militer masih tetap berkuasa (Maizland 2022). Di samping itu, tekanan internasional juga cukup kuat sementara di saat yang sama, rezim

junta Myanmar nampaknya mencoba untuk menarik investasi internasional dan mengurangi ketergantungan kepada Cina. Pada tahun 2008, konstitusi baru diterapkan dimana dengan konstitusi tersebut, meskipun militer tidak berkuasa, namun mereka punya wewenang yang cukup besar. Konstitusi ini bertahan sampai sekarang. Rezim militer terus berkuasa sampai pada tahun 2015.

Perubahan besar muncul pada tahun 2015 ketika pemilihan umum secara nasional dengan sistem multi partai untuk pertama kali dilakukan (Maizland 2022). Pada pemilu tersebut, partai NLD (*the National League for Democracy*), partai yang didirikan oleh, salah satunya, Aung San Suu Kyi, tokoh pro demokrasi Myanmar, memenangkan secara telak pemilu tersebut. Suu Kyi sendiri tidak menjadi presiden, tetapi ia sesungguhnya adalah yang berkuasa di balik layar. Meski kelompok militer kalah, namun mereka masih mempunyai kekuasaan yang besar. Konstitusi Myanmar mengatur bahwa militer tetap mendapatkan jatah kursi di perlemen, bertanggung jawab atas keamanan domestik, sebagian besar urusan luar negeri dan banyak hal lainnya terkait dengan kebijakan domestik.

Kemenangan partai liberal demokratis ini berlanjut pada pemilu 2020 dimana partai proksi militer, USDP (*the Union Solidarity and Development Party*)

kalah telak. Namun, setahun kemudian, terjadi kudeta oleh rezim junta militer (Maizland 2022). Suu Kyi ditahan atas tuduhan korupsi dan terlibat kejahatan lain. Para petinggi partai NLD dan partai lain, termasuk para aktivis divonis sebagai tahanan rumah. Hal ini memicu protes dari berbagai elemen yang memicu kerusuhan nasional. Para pekerja melakukan mogok kerja sampai pemerintahan yang sah dikembalikan (Aljazeera 2023; Maizland 2022). Berbagai tokoh kunci, mulai dari elit partai, pemimpin protes dan para aktivis dari berbagai kelompok minoritas akhirnya membentuk pemerintahan tandiangan bernama NUG (*the National Unity Government*). Berbagai protes yang dilakukan oleh kelompok ini mendapatkan perlakuan keras dari rezim militer yang berdampak pada kritik keras dari berbagai organisasi internasional, termasuk PBB dan pemerintahan internasional.

Dalam merespon situasi di Myanmar, ASEAN sendiri tidak tinggal diam. Sembilan pemimpin negara ASEAN dan kepala junta militer Myanmar, Sr. Gen. Min Aung Hlaing, bertemu di Jakarta pada tanggal 24 April 2021 dan membuat 5 kesepakatan: pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan; kedua, demi kepentingan bersama, para pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif untuk mencari solusi damai; ketiga, utusan khusus

ASEAN akan memfasilitasi dialog yang dimaksud; dan kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan berkunjung ke Myanmar untuk menemui para pihak (Human Rights Watch 2022). Kelima kesepakatan ini diharapkan menjadi awal yang positif untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar.

Namun, tidak lama berselang setelah kesepakatan itu, pemerintah junta militer Myanmar justru terus melakukan tindak kekerasan. Atas situasi ini, para pemimpin ASEAN pada akhirnya memutuskan untuk tidak melibatkan pemerintahan junta militer Myanmar dalam pertemuan ASEAN Summit pada Oktober 2021, melainkan meminta perwakilan non-politik untuk terlibat disana (Human Rights Watch 2022). Permintaan ini ditolak oleh Myanmar. Langkah yang ditempuh ASEAN ini dianggap sebagai tindakan yang cukup maju mengingat prinsip *non-interference* yang dipegang teguh ASEAN. Perwakilan dari Singapura menyebut bahwa ini adalah langkah yang sulit tapi harus dilakukan mengingat tidak adanya kemajuan yang cukup berarti dari kondisi Myanmar setelah pertemuan 5 kesepakatan di bulan April itu.

Ini membuat desakan kepada ASEAN untuk melakukan tindakan lebih tegas kepada Myanmar perlu segera dilakukan, termasuk upaya penanggulangan Myanmar dari keanggoratan ASEAN (N00r 2021). Fenomena penanggulangan

keanggotaan negara dalam sebuah organisasi internasional bukanlah hal yang baru sama sekali. PBB pernah mengganggu keanggotaan Libya dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 lalu menyusul pecahnya protes anti-pemerintah di negara Afrika ini (FP Explainers 2022). Kasus paling baru adalah penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan ini setelah tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina.

### ***Non-Interference* dan Sikap Pragmatis ASEAN**

Dalam menyikapi kedua kasus diatas, sikap negara ASEAN cukup beragam. Dalam kasus Rusia-Ukraina misalnya, negara ASEAN menunjukkan sikap yang tidak tunggal, baik dalam menyikapi invasi maupun penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan Keamanan PBB. Sikap ini jelas terbaca dalam dua voting resolusi yang dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret dan April 2022 dimana sikap negara ASEAN terbagi. Dalam voting bulan Maret (terkait invasi), sikap negara anggota ASEAN terbelah antara mendukung resolusi menekan Rusia menghentikan serangan ke Ukraina (8 negara) dan abstain (2 negara). Sedangkan dalam voting bulan April (soal penangguhan Rusia dari dewan keamanan PBB), sikap negara anggota terbagi menjadi tiga: mendukung (6 negara),

menolak (2 negara) dan abstain (2 negara) (Tiezzi 2022).

Dalam kasus Myanmar, semua anggota, secara normatif, memiliki sikap yang sama yakni agar kekerasan yang terjadi di Myanmar segera dihentikan. Namun demikian, bagaimana mereka seharusnya bertindak masih menjadi pertanyaan. Ini karena prinsip *non-interference* yang masih sangat kuat dalam tubuh ASEAN. Di satu sisi, turut campur dalam kasus Myanmar bisa dianggap intervensi dan cenderung menyalahi prinsip *non-interference* tersebut. Di sisi yang lain, tidak adanya sikap tegas yang diambil akan makin menunjukkan bahwa taji ASEAN sangat terbatas, bahkan mengalami amputasi sejak dini.

Sebagai catatan, isu hak asasi manusia dalam konteks negara ASEAN merupakan hal yang cukup sensitif. Meskipun isu Hak Asasi Manusia dan demokrasi sudah didorong semenjak ASEAN Charter tahun 2007 (Caballero-Anthony 2008) dan kemudian pembentukan AICHR 2009 dan adopsi ADHR 2012, upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Wahyuningrum 2021). Dalam konteks ini, abstainnya beberapa anggota ASEAN terkait dengan penangguhan keanggotaan Rusia misalnya menemukan rasionalisasinya. Argumentasi yang disampaikan menggarisbawahi perlunya penyelidikan terlebih dahulu

sebelum panangguhan keanggotaan dilakukan. Pengambilan sikap dalam bentuk memberikan sanksi tanpa melalui pembuktian pelanggaran hanya akan menjadi preseden yang buruk.

Merujuk data indeks kebebasan yang dikeluarkan oleh *Freedom House* tahun 2022, dari 6 negara anggota ASEAN yang memilih abstain, 3 negara berstatus *partly free* (Indonesia (skor 59), Malaysia (skor 50), Singapura (skor 47) sedangkan 3 negara lainnya berada pada level *not free* (Brunei Darussalam (skor 28), Thailand (skor 29), Kamboja (skor 24) (Freedom House 2022). Data ini menunjukkan banyak negara anggota ASEAN yang masih berkutut dengan isu pelanggaran hak sipil dan politik.

Dalam konteks ini, pilihan untuk abstain, dalam kasus penangguhan, dengan mendorong pentingnya penyelidikan terlebih dahulu menjadi pilihan yang masuk akal. Selain untuk membentengi persoalan penanganan isu kebebasan hak sipil dan politik di wilayah domestik negara masing-masing dan agar tidak diintervensi secara sepihak, argumentasi mereka juga menekankan pentingnya taat pada aturan bersama, terutama dalam hal-hal yang sensitif seperti ini. Menimbang argumentasi di atas, sikap abstain ini cenderung bersifat pragmatis-normatif.

Sikap mendukung yang diambil Filipina dan Myanmar, dalam konteks tertentu, erat terkait dengan kepenti-

ngan politik masing-masing. Perwakilan Myanmar yang ada di PBB sekarang tidak merepresentasikan rezim junta militer yang sedang berkuasa. Pemerintahan junta militer Myanmar sendiri mengirimkan sinyal positif mendukung Rusia (Tiezzi 2022). Lebih lanjut, Rusia adalah salah satu negara yang disebut menyuplai persenjataan bagi rezim ini (Hutt 2022).

Terkait Filipina, pernyataan terakhir mereka yang siap membuka pangkalan militer untuk Amerika dalam menyikapi invasi Rusia ini seolah menggambarkan sikap mereka dalam konteks rivalitas Amerika-China plus Rusia. Filipina sendiri mempunyai traktat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, MDT (*Mutual Defence Treaty*), yang ditandatangani pada 30 Agustus 1951. Meski dalam perkembangannya, terutama di era Duterte, muncul ambivalensi hubungan di antaranya keduanya (Strangio 2022). Dalam kasus Russia-Ukraina ini, posisi Filipina bisa disebut cukup konsisten berada di barisan Amerika Serikat. Sementara di saat yang sama, masih terdapat ganjalan hubungan antara Filipina dan China terkait sengketa laut Cina Selatan dan Cina sendiri dalam konflik Rusia-Ukraina berada dalam posisi yang condong ke arah Rusia. Dalam hal ini, sikap Filipina dan Myanmar bisa disebut sebagai pragmatis-politis.

Sedangkan sikap ketiga, yakni penolakan resolusi yang dipilih oleh

Vietnam dan Laos, dalam konteks *non-interference*, lebih diwarnai oleh pertimbangan sejarah dan kepentingan ekonomi. Hubungan Vietnam dengan Rusia sudah dimulai semenjak masa Uni Soviet, khususnya tahun 1950, ketika Uni Soviet membuka kedutaan di Vietnam. Setelah Soviet jatuh, hubungan baik ini tetap dipelihara oleh Rusia. Mereka mengembangkan kerja sama ekonomi dalam eksplorasi minyak mentah di Vietnam (Day 2022). Bahkan, Rusia disebut sebagai salah satu negara pemasok persenjataan di Vietnam yang mencapai angka 80 % (Hutt 2022).

Negara Laos juga mempunyai hubungan historis yang lama dengan Uni Soviet, terutama semenjak proklamasi kemerdekaan Laos pada tahun 1975. Uni Soviet banyak membantu negara yang baru merdeka ini dalam menyediakan fasilitas logistik, membantu sektor kesehatan, pertanian, pendidikan dan sektor lainnya. Setelah Soviet runtuh, hubungan diantarnya tetap di pertahankan oleh Rusia dimana kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan di antara keduanya makin intensif (Lavrov 2020). Sikap yang diambil oleh Vietnam dan Laos ini cenderung bersifat pragmatis-historis dengan bumbu ekonomi.

Dalam kasus Myanmar, meskipun negara-negara anggota ASEAN menolak kekerasan yang terjadi di sana, namun terdapat perbedaan sikap anggota

ASEAN terkait Myanmar. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Philipina cenderung bersikap tegas dengan mengkritik keras tindak kekerasan junta militer dan menyerukan agar larangan pelibatan perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan ASEAN terus dilanjutkan. Sementara itu, Kamboja, sebagai chair ASEAN tahun 2022, misalnya cenderung mengambil jalan yang lebih kompromis dengan mengunjungi pemerintahan junta militer meskipun tidak diberi akses bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Tindakan Kamboja bisa disebut sebagai pragmatis-kompromis meskipun langkah yang ditempuh tidak berdampak besar. Dalam 5 poin kesepakatan, terutama poin ke lima, utusan khusus ASEAN harus diberikan akses untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk kubu anti pemerintah junta militer. Sebelumnya, utusan khusus ASEAN dari Brunei Darussalam ditolak masuk ke Myanmar ketika hendak bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin yang ditahan.

Sementara ada usulan untuk memberikan tindakan tegas, termasuk penangguhan keanggotaan Myanmar dari ASEAN, namun hal ini nampaknya sulit untuk dilakukan. Ada beberapa alasan tentang hal ini. *Pertama*, ASEAN cenderung memilih pendekatan konsensus dan strategi diplomasi senyap yang dilandasi prinsip *non-interference* dalam menyikapi konflik. Penangguhan keang-

gotaan Myanmar bisa disebut akan mencederai prinsip di atas. Lagi pula, penangguhan sebuah negara tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Contoh konkret adalah penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB. Alih-alih meredakan ketegangan dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sampai hari ini perang masih berlanjut tanpa kepastian kapan perang akan berakhir. Dan ini tidak hanya berdampak kepada situasi di kedua negara tapi juga situasi global.

*Kedua*, penangguhan keanggotaan sendiri tidak disebutkan dalam Piagam ASEAN. Berbeda dengan PBB yang menyebutkan soal penangguhan anggota yang disebutkan dalam Piagam PBB bagian 2 poin 5 bahkan pengeluaran (poin 6), ASEAN tidak menyebutkan secara spesifik soal penangguhan ini. Ketika ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh sebuah negara, maka keputusan terkait langkah penyelesaian atau pemberian sanksi akan ditentukan lewat pertemuan ASEAN (*ASEAN Summit*). Ini berarti bahwa penangguhan mungkin dilakukan ketika ada kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam *ASEAN Summit*. Meski demikian, kesepakatan ini nampaknya juga susah untuk dicapai mengingat sikap anggota soal pengambilan tindakan tegas sulit untuk mencapai keseragaman.

Pekerjaan rumah penting bagi ASEAN sekarang ini adalah mengupayakan penghentian tindak kekerasan dan

pelanggaran yang masih terus terjadi di Myanmar. 5 kesepakatan yang ada, setelah dua tahun berjalan, terbukti tidak efektif. Karena itu, para pemimpin ASEAN perlu memikirkan langkah alternatif lain yang lebih tegas seperti kesepakatan yang lebih mengikat terkait waktu. Selain itu, upaya untuk melakukan sanksi terbatas dalam bentuk pengontrolan pendapatan mata uang asing ataupun pembelian senjata bagi Myanmar bisa dilakukan (Quinn 2022). Lebih dari itu, ASEAN juga perlu melibatkan pihak lain seperti PBB ataupun negara lain dalam mengupayakan penghentian tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar dengan langkah yang lebih konkret. Ini untuk menepis anggapan bahwa ASEAN, yang memegang teguh prinsip non-interference dan konsensus, hanya dijadikan tameng bagi Myanmar dalam melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran mereka.

## Penutup

Tulisan ini mendiskusikan sikap negara ASEAN atas konflik Rusia-Ukraina dengan mengaitkannya pada prinsip *non-interference*. Variasi sikap atas konflik Rusia-Ukraina yang ditunjukkan dalam voting di PBB erat terkait dengan bagaimana mereka menafsirkan non-interference dalam konteks internasional. Sebagaimana disebut sebelumnya, tidak ada tafsir tunggal atas non-interference ini dan karena itu

tidak mengherankan ketika pemaknaan atas prinsip ini memunculkan keragaman tafsir. Lebih lanjut, dalam praktiknya pertimbangan pragmatis, bukan idealisme nilai, seringkali menjadi pertimbangan. Dari sini, tidak mengherankan ketika kecenderungan pragmatis cenderung mewarnai pilihan-pilihan sikap yang akan diambil.

Dalam kasus Myanmar, tindakan serupa juga terjadi, meskipun tidak sama persis dengan kasus Rusia-Ukraina. Ada variasi ketegasan sikap yang ditunjukkan. Ini karena bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi kepada mereka sendiri. Apalagi, masing-masing negara ASEAN mempunyai masalah dengan isu HAM. Meski demikian, kasus Myanmar adalah tantangan serius bagi kredibilitas ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di Asia Tenggara. Kasus ini bisa menjadi momentum bagi para pemimpin organisasi ini untuk

melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya penyelesaian konflik kekerasan yang dialami negara anggota. Termasuk dalam hal ini adalah meninjau ulang atau menafsirkan secara progresif prinsip *non-interference* yang selama ini dianut yang dalam praktiknya sering ditafsirkan dan digunakan secara pragmatis. Apalagi ketika kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Kredibilitas ASEAN tidak hanya tergantung pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan anggota, tapi juga kemauan dan keterbukaan untuk bekerja sama dengan organisasi lain seperti PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik lain dalam kawasan regional maupun internasional. Karena itu, tanpa menafsirkan kembali prinsip *non-interference* secara progresif dan konstruktif, maka peran ASEAN tidak akan berlayar jauh.

## Referensi

Alichsan, MD 2019, 'Non-Interference Principle or Doing Nothing? Role of ASEAN in *Contemporary Geopolitical Conflicts: The Case of South China Sea Dispute*', Master Thesis, International Institute of Social Studies, The Hague.

Aljazeera 2023. Timeline: Two years since the Myanmar military coup, *Aljazeera*, 01 Februari,

dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.aljazeera.com/news/2023/2/1/timeline-two-years-since-the-myanmar-military-coup>).

Amnesty Internasional 2021, Surat Terbuka: Hentikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi di Myanmar, *Amnesty Internasional*, 23 April, dilihat 10 Februari 2024,

- (<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/surat-terbuka-hentikan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-terjadi-di-myanmar/04/2021/>).
- Bellamy, AJ & Drummond C 2011. 'The responsibility to protect in Southeast Asia: between non-interference and sovereignty as responsibility', *The Pacific Review* Vol. 24, No. 2, pp. 179-200.
- Anthony, MC 2008. 'The ASEAN Charter: An Opportunity Missed or One that Cannot Be Missed?' *Southeast Asian Affairs*, Project MUSE, pp. 71-85.
- Day, J 2022, Russia-Vietnam relationship explained after controversial vote on UN Human Rights Council, *Express*, 13 April, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.express.co.uk/news/world/1595111/russia-vietnam-un-human-rights-council-ukraine-war-spt>).
- Explainers, FP 2022, Russia isn't the only country to be removed from UN Human Rights Council: How does a suspension work and why it's significant, *First Post*, 8 April, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.first-post.com/world/russia-isnt-the-only-country-to-be-removed-from-un-human-rights-council-how-does-a-suspension-work-and-why-its-significant-10530591.html>).
- Freedom House 2022, *Countries and Territories*, Freedom House, dilihat 15 Februari 2024, (<https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>).
- Huma Rights Watch 2022, Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On, *Human Rights Watch*, 22 April, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>).
- Hutt, D 2022, Ukraine conflict: What's behind Southeast Asia's muted response? *Deutsche Welle*, 03 Juli, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.dw.com/en/ukraine-conflict-whats-behind-southeast-asias-muted-response/a-61039013?maca=en-Whatsapp-sharing>).
- Lee, J 2010, 'ASEAN's unchanged melody? The theory and practice of 'non-interference' in Southeast Asia', *The Pacific Review*, Vol. 23, No. 4, pp. 479-502.

- Katsumata, H 2003. 'Reconstruction of diplomatic norms in Southeast Asia: the case for strict adherence to the "ASEAN way', *Contemporary Southeast Asia* Vol. 25 No. 1, pp. 104-121.
- Lavrov, S 2020, Russia-Laos: 60 Years of Friendship and Partnership, *Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*, 07 Oktober, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.mid.ru/en/maps/la/1443602/>).
- Lim, PH and Yang, L 2021, ASEAN Summit Opens Without Myanmar Presence, *Voice of America*, 26 Oktober, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.voanews.com/a/asean-summit-opens-without-myanmar-presence-/6286818.html>).
- Maizland, L 2022, Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict, *Council on Foreign Relations*, 31 Januari, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>).
- Nagourney, B & Perez P 2023. A Year of War in Ukraine: The Roots of the Crisis, *The New York Times*, 27 Februari, dilihat 01 Maret 2024, (<https://www.nytimes.com/article/russia-ukraine-nato-europe.html>).
- Nesadurai, HES 2009, 'ASEAN and regional governance after the Cold War: from regional order to regional community?' *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 1, pp. 91-118.
- Noor, E 2021, Engage Myanmar But Suspend from ASEAN, *The Jakarta Post*, 12 April, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.thejakartapost.com/paper/2021/04/12/engage-myanmar-but-suspend-from-asean.html>).
- Oktarianisa, S 2022. Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina, *CNBC Indonesia*, 04 Maret, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/1>).
- Quinn, C 2022, Myanmar's Meaningless Five-Point Consensus, *Foreign Policy*, 11 Mei, dilihat 10 Februari 2024, (<https://foreignpolicy.com/2022/05/11/myanmar-five-point-consensus-asean/>).
- Strangio, S 2022, Philippines Pledges to Back US if Ukraine Conflict

- Spreads to Asia, *The Diplomat*, 11 Maret, dilihat 15 Februari 2024. Tersedia di (<https://thediplomat.com/2022/03/philippines-pledges-to-back-us-if-ukraine-conflict-spreads-to-asia/>).
- Stubbs, R 2008, 'The ASEAN alternative? Ideas, institutions and the challenge to 'global' governance', *The Pacific Review*, Vol. 21 No. 4, pp. 451-468.
- Suzuki, S 2019, 'Why is ASEAN not intrusive? Non-interference meets state strength', *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 8 No. 2, pp. 157-176, (<https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1681652>).
- Thestar.com 2022a, Cambodia and five Asean nations abstain from Russian UN human rights vote." *The Star*, 08 April, dilihat 15 Februari 2024. (<https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/04/08/cambodia-and-five-asean-nations-abstain-from-russian-un-human-rights-vote>).
- Thestar.com 2022b, Malaysia abstains in vote to suspend Russia from UN rights council." *The Star*, 8 April, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/04/08/malaysia-abstains-from-voting-to-suspend-russia-from-un-human-rights-council>).
- Tiezzi, S 2022, Which Asian Countries Voted to Suspend Russia's UNHCR Membership?, *The Diplomat*, 8 April, dilihat 15 Februari 2024, (<https://thediplomat.com/2022/04/which-asian-countries-voted-to-suspend-russias-unhrc-membership/>).
- Wahyuningrum, Y 2021, 'A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges', *Journal of Human Rights*, 20 (2), pp. 158-175, (<https://doi.org/10.1080/14754835.2021.1875811>).
- Walker, S 2019, Comedian wins landslide victory in Ukrainian presidential election, *The Guardian*, 21 April, dilihat 10 Februari 2024, (<https://www.theguardian.com/world/2019/apr/21/zelen-skiy-wins-second-round-of-ukraines-presidential-election-exit-poll111111>).
- Wardah, F 2022, Alasan Indonesia Abstain soal Keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB, *Kompas.com*, 09 April, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.kompas.com/global/read/2022/04/09/192900370/alasan>).

indonesia-abstain-soal-keanggotaan-rusia-di-dewan-ham-pbb?page=all).

Zhang, LM 2022, S'pore abstains from UN vote on Russia: MFA says awaiting probe on human rights violation in Ukraine,

*The Strait Times*, 09 April, dilihat 15 Februari 2024, (<https://www.straitstimes.com/singapore/abstention-in-un-vote-mfa-says-spore-awaiting-findings-on-human-rights-violation-in-ukraine>).